BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak korban dalam tindak pidana kekerasan seksual di Unit PPA Polrestabes Surabaya telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan bukti, keterlambatan pelaporan, dan tekanan dari pelaku maupun lingkungan sekitar korban. Peningkatan kasus dari bulan ke bulan menunjukkan bahwa meskipun sistem pelaporan mulai berjalan, perlindungan dan pencegahan belum maksimal diterapkan.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit PPA mencakup tindakan preventif dan represif, seperti edukasi hukum, pendampingan psikologis, koordinasi dengan lembaga terkait, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku. Namun demikian, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menjangkau masyarakat lapisan bawah dan memperluas akses pelaporan yang aman dan cepat bagi anak sebagai korban.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran untuk meminimalisasi permasalahan serupa yaitu:

1. Diperlukan penguatan peran Unit PPA melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pelatihan khusus bagi penyidik dan petugas

yang menangani anak korban kekerasan seksual. Hal ini agar proses hukum dapat berjalan secara profesional, ramah anak, serta tidak menimbulkan trauma baru bagi korban.

2. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu membentuk sistem pelaporan dan perlindungan berbasis komunitas yang lebih mudah diakses dan menjamin kerahasiaan korban, serta mendorong pendidikan seks dan literasi digital sejak usia dini. Dengan demikian, anak dapat mengenali bentuk kekerasan seksual sejak awal dan masyarakat terdorong untuk aktif mencegah dan melaporkan tindakan kekerasan seksual.